Pontianak Post ■ Selasa 2 Agustus 2011

Kembalikan Dana Daerah dari Rekening Pribadi

PONTIANAK - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat terkait adanya dana yang tidak disetor ke kas daerah tetapi disimpan di rekening pribadi, kini sudah dianggap selesai. Soalnya, dana dari rekening pribadi itu sudah dibayarkan ke kas daerah.

"Sudah disetor semua. Jadi, masalahnya sudah tuntas," kata Kepala DKP Kalbar Gatot Rudiyono kemarin. Bahkan, tambah Gatot, bunga bank yang diperoleh dari dana daerah di rekening pribadi itu pun telah dibayarkan ke kas daerah.

Pernyataan ini menyusul kritik yang disampaikan dari Fraksi PPP DPRD Kalbar beberapa waktu lalu. Fraksi ini meminta gubernur menindak tegas oknum pejabat di sejumlah instansi yang menyimpan keuangan daerah di rekening pribadi sebagaimana temuan BPK.

Bahkan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut juga dinilai perlu dikenai sanksi karena diduga telah melakukan pembiaran terhadap penyimpangan. "Di DKP, ada pendapatan tidak langsung disetor ke kas daerah tetapi disimpan terlebih dahulu ke rekening pribadi

• *ke halaman 15 kolom 2*

Kembalikan Dana Daerah dari Rekening Pribadi

Sambungan dari halaman 9

sekretaris dinas. Ini berlangsung sejak 2008 sampai 2010 dengan jumlah Rp128 juta lebih. Dana itu baru disetor ke kas daerah tahun 2010," ungkap Anggota Fraksi PPP, Miftah.

Padahal, dana itu merupakan pendapatan asli daerah yang harus masuk ke dalam APBD. Kejadian ini sangat disesalkan karena menunjukkan lemahnya pengawasan dan keseriusan dari pimpinan SKPD. Fraksi PPP pun berharap masalah seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

Sementara menurut Gatot, masalah ini terjadi sebelum dirinya bertugas di Kalbar. Gatot baru menjabat Kepala DKP Kalbar pada 2010 sedangkan masalah ini menyangkut program kegiatan DKP di tahun 2007. "Pada saat itu, ada kegiatan yang sifatnya kerjasama operasi di tahun 2007. Sekretaris dinas sempat konsultasi dulu ke Dispenda, ternyata pos untuk pembayarannya belum ada," jelas Gatot. Akhirnya, dana itu dimasukkan ke rekening pribadi.

"Saya kan masuk baru 2010, sehingga begitu saya tahu, langsung saya minta cepat disetorkan ke rekening kas daerah. Jadi bukan di masa saya," tambahnya. Mengenai sanksi yang diberikan kepada oknum pejabat tersebut, Gatot menyatakan tidak tahu-menahu. Dia menyerahkan masalah pemberian sanksi ini kepada gubernur. Tetapi Gatot mengungkapkan bahwa saat ini, pejabat yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris di DKP.

Gubernur Kalbar Cornelis, ketika menyampaikan sambutan dalam sidang paripurna, Senin (1/8) juga mengatakan bahwa masalah ini telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK dan sudah dinyatakan selesai. Semua dana yang berjumlah Rp130 juta telah dikembalikan ke kas daerah secara bertahap.

Sejumlah Rp114,16 juta dikembalikan tanggal 25 Januari 2010 dan Rp15 juta dikembalikan tanggal 12 Juli 2010. Sementara, bunga yang dihasilkan sebesar Rp1.523.035 juga sudah disetor ke kas daerah pada 24 Februari 2011. ***(rnl)***